

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Definisi Akuntansi

Ilmu Akuntansi sangat berperan penting dalam kegiatan operasi perusahaan atau suatu organisasi. Dengan demikian apabila suatu perusahaan ataupun organisasi menggunakan akuntansi dengan baik, maka dapat menyediakan data keuangan yang diperoleh oleh pihak intern maupun ekstern.

Pengertian akuntansi Menurut Samryn (2014:3) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut :

Suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan.

Menurut Hery (2016:2) pengertian Akuntansi adalah :

Sebagai Sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan.

Menurut Hans Kartikahadi, dkk (2012:3) adalah:

Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut Arfan Ikhsan (2011:2) akuntansi adalah :

Seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang, serta interpretasi dari hasil proses tersebut.

Dalam buku Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa (2015:6) Akuntansi adalah :

Suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya

Jadi, dapat disimpulkan pengertian Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pengokhtisaran suatu transaksi yang bersifat keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

2. Siklus Akuntansi

Dalam proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, akuntansi harus melewati beberapa tahapan proses. Proses tersebut di mulai dari mengumpulkan dokumen transaksi, mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis, meringkas, hingga melaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Dengan demikian, untuk sampai pada penyajian informasi keuangan yang dibutuhkan harus melewati proses yang disebut dengan siklus akuntansi.

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dkk (2014:173) langkah-langkah dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut :

- 1) Menganalisis dan mencatat transaksi – transaksi kedalam buku jurnal

- 2) Posting transaksi tersebut kedalam buku besar
- 3) Menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan
- 4) Menyiapkan dan menganalisis penyesuaian
- 5) Menyiapkan kertas kerja akhir periode
- 6) Membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar
- 7) Menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan
- 8) Menyiapkan laporan keuangan
- 9) Membuat ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar
- 10) Menyiapkan daftar saldo setelah penutup

Proses akuntansi yang dilakukan di mulai dari menganalisis transaksi sehingga menjadi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak tertentu, hal ini harus dilakukan terus-menerus dan secara berulang-ulang. Dan siklus akuntansi merupakan tahap-tahap kegiatan dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi, mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan dibuatnya laporan keuangan yaitu :

a) Transaksi

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:17) pengertian transaksi sebagai berikut :

Setiap kejadian yang mengubah posisi keuangan (kekayaan, utang, dan modal) hasil usaha perusahaan/lembaga.

b) Bukti Transaksi

Menurut Abdul Halim (2014:43-47) bukti transaksi adalah :

Transaksi yang terjadi pertama-tama akan direkam dalam formulir sehingga formulir tersebut merupakan bukti. Formulir-formulir ini dibagi menjadi formulir internal yaitu formulir yang dibuat oleh organisasi yang bersangkutan dan formulir-formulir yang diterima dari luar organisasi.

c) **Jurnal (*Journal*)**

Pengertian Jurnal menurut Al- Haryono Jusup (2011:82) adalah sebagai berikut :

Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis (berdasarkan aturan waktu yang terjadi) dengan menunjukkan rekening yang harus di debit dan di kredit serta jumlah rupiahnya masing-masing.

d) **Buku Besar**

Setelah dibuat jurnal, maka jurnal-jurnal tersebut di posting kedalam buku besar.

Menurut Rizal Efendi (2015:29) Buku besar adalah sebagai berikut: kumpulan dari rekening-rekening atau akun-akun yang digunakan dalam perusahaan atau entitas bisnis.

e) **Neraca Saldo**

Neraca saldo adalah saldo seluruh akun/perkiraan yang ada dalam buku besar pada waktu tertentu yang berisi nama-nama akun/perkiraan yang terdapat dalam buku besar beserta saldonya masing-masing. Penyusutan neraca saldo dapat digunakan untuk mengecek keseimbangan antara debit dan kredit dari seluruh akun/perkiraan buku besar.

Menurut Rizal Efendi (2015:31) Neraca Saldo adalah sebagai berikut:

Akun-akun yang ada dalam buku besar suatu organisasi pada saat tertentu.

f) Jurnal Penyesuaian

Setelah disusun neraca saldo, maka proses selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian harus dibuat pada akhir periode, ayat jurnal penyesuaian berguna untuk mengkoreksi akun-akun tertentu sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban yang sebenarnya.

Menurut Rizal Efendi (2015:58) jurnal penyesuaian adalah :

Ayat jurnal yang dibuat diakhir tahun tutup buku yang tujuannya untuk mengetahui saldo neraca dan laba-rugi yang sebenarnya, karena diakhir periode pembukuan ada transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat dan ada transaksi yang sudah dicatat tetapi harus dikoreksi.

g) Laporan Keuangan

Pada akhir siklus akuntansi, harus membuat laporan keuangan untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia,

Menurut James M. Reeve, dkk (2009:22) laporan keuangan terdiri dari :

- 1) Laporan laba rugi komprehensif (*Statement of Comprehensive Income*)
- 2) Laporan perubahan ekuitas (*Statement Of Change In Equity*)
- 3) Laporan posisi keuangan (*Statement Of Financial Position*)
- 4) Laporan arus kas (*Statement Of Cash Flow*)
- 5) Catatan atas laporan keuangan.

3. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

a. Pengertian Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam buku Suhartono (2000:10)

Desa :

- 1) Sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun;
- 2) udik atau dusun (dalam arti) daerah pedalaman sebagai lawan kota;
- 3) tempat; tanah; daerah.

Menurut Permendagri No. 47 tahun 2016 mendefinisikan Desa sebagai berikut :

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hanif (2011:1) Desa adalah :

Satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum.

Menurut Wiratna (2015:1) pengertian Desa adalah sebagai berikut :

Sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang terdapat dimanapun di dunia sebagai komunitas kecil dan membentuk

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

b. Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 pengertian Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

4. Pengertian keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pengertian keuangan desa adalah :

Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:123) keuangan desa adalah :

Semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik Desa.

Menurut pasal 71 ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pengertian keuangan Desa adalah :

Hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban milik Desa baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

5. Sistem Pencatatan Desa

Menurut Erlina, dkk (2015:4-5) Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu sistem pencatatan *Single Entry*, *Double Entry*, dan *Triple Entry*. Salah satu yang membedakan pembukuan dan akuntansi adalah dalam penggunaan sistem pencatatan. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan *Single Entry*, sedangkan akuntansi dapat menggunakan *Double Entry* dan *Triple Entry*.

a. *Single Entry*

Sistem pencatatan *Single Entry* sering disebut juga dengan tata buku tunggal. Dalam sistem *Single Entry*, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibatkan bertambahnya kas akan dicatat di sisi penerimaan, sedangkan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat di sisi pengeluaran di dalam buku kas umum (BKU).

b. *Double Entry*

Sistem pencatatan *Double Entry* sering disebut juga sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali, dalam artian, bahwa setiap transaksi minimal akan memengaruhi dua perkiraan, satu di sisi kredit dan satu di sisi debit.

c. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *Triple Entry* pada dasarnya adalah sistem pencatatan yang menggunakan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.

6. Azas dan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:27) keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan pengertian pengelolaan keuangan desa adalah :

Sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

a. Perencanaan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 20 sebagai berikut :

- 1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 24 sebagai berikut :

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 35 sebagai berikut :

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban di sampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- 5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana di maksud menggunakan : (a) Buku Kas Umum (b) Buku Kas Pembantu Pajak, dan (c) Buku Bank.

d. Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37 pelaporan keuangan desa tersebut ialah sebagai berikut :

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- 1) Laporan semester pertama berupa Laporan Realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
- 2) Laporan Semester akhir tahun berupa Laporan Realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan

e. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 38 pertanggungjawaban yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan Desa.
- 4) Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri :
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan
 - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

f. Pembinaan dan pengawasan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 44 pembinaan dan pengawasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa
- 2) Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

7. Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Dalam buku Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa (2015:12)

siklus Akuntansi adalah :

Gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan dimulai pada saat terjadi transaksi.

Dalam buku Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa (2015:15-16)

tahapan siklus akuntansi Desa adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pencatatan
Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi desa, berawal dari bukti-bukti transaksi. Selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.
- b. Tahap penggolongan
Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi kedalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit.
- c. Tahap pengikhtisaran
Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja laporan kekayaan milik desa berisi saldo akhir akun-akun yang dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam laporan kekayaan milik desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

d. Tahap pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi desa. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :

- 1) Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk anggaran tahun tertentu
- 2) Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

Sedangkan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 siklus akuntansi terdiri dari empat tahap :

- a. Tahap pertama, pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Pada tahap awal pengelolaan keuangan desa dilakukan pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- b. Tahap kedua, transaksi yang timbul dari desa. Setelah anggaran pendapatan dan belanja disahkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dilakukan disertai bukti-bukti berupa nota maupun kuitansi.
- c. Tahap ketiga, transaksi yang timbul dari desa kemudian dibukukan. Setelah anggaran pendapatan dan belanja disahkan, kemudian dilaksanakan pelaksanaan tersebut dibukukan oleh bendahara desa dengan membuat buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu pajak, buku bank dan neraca kas.
- d. Tahap ke empat, ini merupakan tahap akhir yaitu pembuatan laporan Realisasi Anggaran (LRA). Bentuk pertanggungjawaban pemerintahan desa berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

8. Laporan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Laporan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
2. Buku kas umum
Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai, maupun secara kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi

perbankan/kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

3. Buku pajak
Digunakan untuk membantu kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
4. Buku bank
Digunakan untuk membantu kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan Bank.
5. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berisi laporan Realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:125) Laporan keuangan desa terdiri

dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
 - a) Belanja langsung adalah kelompok belanja yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang manfaatnya langsung bisa dirasakan.
 - b) Belanja tidak langsung adalah kelompok belanja yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang manfaatnya dinikmati secara terbatas, misal oleh pemerintahan desa saja
 - c) Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran sekarang, maupun yang akan datang.
 - d) Dana cadangan adalah dana yang dicadangkan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. Dana tersebut dapat didepositikan. Kegiatan akan dilaksanakan apabila dana cadangan sudah mencukupi.
 - e) Penyertaan modal desa adalah investasi yang diikuti oleh desa misalnya melakukan investasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa berdasarkan SPAP menyajikan laporan Realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

3. Neraca Desa

Neraca yang dihasilkan oleh Desa ini menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Tahap-tahap untuk dapat menghasilkan Neraca Desa perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Membuat buku kas Desa
- b) Membuat buku kas harian pembantu
- c) Membuat buku pajak
- d) Membuat buku Bank
- e) Membuat buku hutang
- f) Membuat buku piutang
- g) Membuat buku modal/ekuitas
- h) Membuat buku persediaan
- i) Membuat buku inventaris desa

Dalam buku Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa (2015:40)

laporan keuangan desa sebagai berikut :

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Laporan ini menyajikan informasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau APBDesa perubahan untuk satu tahun anggaran tertentu.

2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun.

B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan telaah pustaka yang dikemukakan diatas maka hipotesis penelitian yaitu :

“Akuntansi yang diterapkan Pada Kantor Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura diduga belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum ”